

**KAJIAN MUATAN UNDANG-UNDANG PERS DAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA ASPEK
KEBEBASAN BERPENDAPAT BAGI JURNALIS**

**(Studi Muatan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pers dan
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Disusun Oleh:

SYAHDA ANEIRA DINIROJA
NPM. 21071010143

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA**

2025

**KAJIAN MUATAN UNDANG-UNDANG PERS DAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA ASPEK
KEBEBASAN BERPENDAPAT BAGI JURNALIS**

**(Studi Muatan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pers dan
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Disusun Oleh:

SYAHDA ANEIRA DINIROJA
NPM. 21071010143

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**KAJIAN MUATAN UNDANG-UNDANG PERS DAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA ASPEK
KEBEBASAN BERPENDAPAT BAGI JURNALIS**

**(Studi Materi Muatan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pers dan
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)**

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
Pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025


Syanda Ancira Diniroja
NPM. 21071010143

Menyetujui
Dosen Pembimbing,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI
SKRIPSI

KAJIAN MUATAN UNDANG-UNDANG PERS DAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA ASPEK
KEBEBASAN BERPENDAPAT BAGI JURNALIS

(Studi Materi Muatan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pers dan
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Penyusun

Syahda Ancira Dinjroja
NPM. 21071010143

Skrripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025

Pembimbing,

Dewan Penguji:
Ketua,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Anggota I

Dessy Maeyangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Anggota II

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

KAJIAN MUATAN UNDANG-UNDANG PERS DAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA ASPEK
KEBEBASAN BERPENDAPAT BAGI JURNALIS

(Studi Materi Muatan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pers dan
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Penyusun,

Syahda Aneka Diniroja
NPM. 21071010143

Skrripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari **Kamis**, tanggal **21 AGUSTUS**, 2025

Pembimbing,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Dewan Penguji:
Ketua,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Anggota I

Dessy Maeyangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Anggota II

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini dengan judul **“KAJIAN MUATAN UNDANG-UNDANG PERS DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA ASPEK KEBEBASAN BERPENDAPAT BAGI JURNALIS (Studi Materi Muatan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pers dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)”**. Penelitian Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir yang wajib dituntaskan sebelum mengakhiri masa studi pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penelitian Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan motivasi dari beberapa pihak. Maka, dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S.H., M.H., selaku Plt. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur sekaligus Dosen Pembimbing Penulis yang telah berkenan untuk membimbing dan memberikan arahan dengan sabar dan sepenuh hati pada proses penulisan Penelitian Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu penulis selama proses menuntut ilmu di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Penelitian Skripsi yang telah memberikan arahan, saran, kritik dan berkenan untuk menguji penulis dalam rangka Sidang Akhir Penelitian Skripsi sebagai salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam pengurusan administrasi yang diperlukan untuk mendukung penyusunan Penelitian Skripsi ini.
9. Ir. Sidik Prasetyo selaku Ayah Penulis, Almh. Sri Yuniati selaku Bunda Penulis, dan Syakira Kintan Larasti serta Shahnaz Alea Nareswari selaku kedua Adik Penulis yang senantiasa mendo’akan, memberikan dukungan, dan kasih sayang yang penuh kepada Penulis dalam menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
10. Keempat sahabat penulis yaitu, Dionella Aisya, Shabirah Azzahra, Shava Raysa dan Sausan Nabilla yang senantiasa memberikan dukungan, arahan,

kritik dan saran kepada penulis dalam menjalani setiap proses dari kehidupan ini.

11. Sahabat kuliah penulis yaitu, Nadia Prasista, Nathaza Diny, Adinda Rizqy, Andriana Ayu, Waode Pinggala, Shera Tri, Charlina Retno, Charlita Ratna, Dewi Rahmawati, dan Sayekti Putri yang telah kebersamai penulis selama proses menuntut ilmu di Fakultas UPN “Veteran” Jawa Timur.
12. Teman seperbimbingan yaitu, Randita Putri dan Azzahra Aisyah yang senantiasa memberi dukungan satu sama lain selama proses penyelesaian Penelitian Skripsi ini.
13. Teman-teman Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
14. Terakhir kepada diri saya sendiri, Syahda Aneira Diniroja. Kehilangan seorang ibu yang sangat disayangi ditengah-tengah proses pengerjaan Penelitian Skripsi bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilalui, tapi terimakasih karena telah berhasil bertahan untuk hidup setiap harinya dan tetap berusaha menuntaskan tanggungjawab untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur meskipun keadaan sebenarnya tidak baik-baik saja.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Penelitian Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat terbuka akan segala kritik dan saran yang ditujukan untuk Penelitian Skripsi ini. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, Penulis ucapkan Terimakasih.

Surabaya, 2025

Penulis

PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahda Ancira Diniroja
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Maret 2003
NPM : 21071010143
Bidang/Konsentrasi : Hukum Tata Negara (HTN)
Alamat : Rungkut Menanggal Harapan Blok T-21, Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul **“KAJIAN MUATAN UNDANG-UNDANG PERS DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA ASPEK KEBEBASAN BERPENDAPAT BAGI JURNALIS (Studi Materi Muatan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pers dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penulis sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar penulisan.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penulis bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 28 Agustus 2025

Penyusun



SYAHDA ANEIRA DINIROJA
NPM. 21071010143

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahda Aneira Diniroja
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Maret 2003
NPM : 21071010143
Bidang/Konsentrasi : Hukum Tata Negara (HTN)
Alamat : Rungkut Menanggal Harapan Blok T-21, Surabaya

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang telah secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka. Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Agustus 2025

Yang membuat Pernyataan



SYAHDA ANEIRA DINIROJA
NPM. 21071010143

INTISARI

Nama : Syahda Aneira Diniroja
NPM : 21071010143
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Maret 2003
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

KAJIAN MUATAN UNDANG-UNDANG PERS DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA ASPEK KEBEBASAN BERPENDAPAT BAGI JURNALIS

**(Studi Muatan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pers dan
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)**

ABSTRAK

Isu hukum yang menjadi pembahasan adalah adanya Jurnalis yang dikenakan sanksi pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008 serta UU ITE 2016 atas hasil kinerja jurnalistiknya yang dipublikasikan melalui media digital, padahal sebenarnya menurut Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers yang berhak menangani permasalahan terkait pemberitaan pers adalah Dewan Pers. Kegiatan pers pada saat ini secara masif dilakukan melalui media digital, sehingga terjadilah kondisi dilematis pada penentuan penerapan antara UU Pers atau UU ITE 2008 serta UU ITE 2016 yang menjadi rujukan utama. Padahal, untuk mengatasi hal tersebut telah dirilis SKB UU ITE 2021 yang menyatakan bahwasannya UU Pers adalah *lex specialis*. Tujuan dari Penelitian Skripsi ini adalah untuk mengetahui ruang lingkup UU Pers dan UU ITE 2008 serta UU ITE 2016 dalam hal mencakup perkembangan media digital dalam sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetahui analisis konstruksi hukum dalam penerapan prinsip harmonisasi hukum pada UU Pers dan UU ITE 2008 serta UU ITE 2016 untuk mendukung kebebasan pers di Indonesia dalam era media digital. Jenis Penelitian Skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan UU Pers dan UU ITE 2008 serta UU ITE 2016 kurang kuat dalam mencakup perkembangan media digital dalam sistem hukum di Indonesia. Terdapat konflik norma yang terjadi antara UU Pers dengan UU ITE 2008 serta UU ITE 2016 khususnya dalam hal ini adalah Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008 serta UU ITE 2016, sehingga perlu untuk dilakukannya harmonisasi hukum horizontal. Pada proses harmonisasi hukum horizontal tersebut tidak perlu untuk mengubah UU Pers, tetapi perlu untuk mengubah UU ITE 2008 serta UU ITE 2016 dengan menambahkan klausul pengecualian atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008 serta UU ITE 2016 terhadap produk pers yang dipublikasi melalui media digital.

Kata Kunci: Pers, Media Digital, UU Pers, UU ITE 2008, UU ITE 2016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN REVISI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	x
INTISARI	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	14
1.6.2 Pendekatan Penelitian	16
1.6.3 Bahan Hukum	17

1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.6.5	Analisis Bahan Hukum	20
1.6.6	Sistematika Penulisan	21
1.7	Tinjauan Pustaka.....	23
1.7.1	Tinjauan Umum Undang-Undang.....	23
1.7.2	Tinjauan Umum Konstruksi Hukum.....	26
1.7.3	Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	28
1.7.4	Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	30
1.7.5	Tinjauan Umum Pers.....	33
1.7.6	Tinjauan Umum Jurnalis	34
1.7.7	Tinjauan Umum Kebebasan Berpendapat.....	35
1.7.8	Tinjauan Umum Media Digital	37
1.7.9	Tinjauan Umum Harmonisasi Hukum	37
1.7.10	Tinjauan Umum Konflik Norma.....	39

BAB II RUANG LINGKUP PASAL 15 AYAT (2) HURUF D UNDANG-UNDANG PERS DAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERKEMBANGAN MEDIA DIGITAL DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA..... 44

2.1	Ruang Lingkup Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pers dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam
-----	--

Mencakup Perkembangan Media Digital Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.....	44
BAB III ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM DALAM PENERAPAN PRINSIP HARMONISASI PADA UNDANG-UNDANG PERS DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK UNTUK MENDUKUNG KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DALAM ERA MEDIA DIGITAL.....	70
3.1 Konflik Norma Dalam Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Berkaitan dengan Kegiatan Jurnalistik yang Dilakukan Melalui Media Digital Secara Daring (<i>Online</i>).....	70
3.2 Analisis Konstruksi Hukum Dalam Penerapan Prinsip Harmonisasi Hukum Pada Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik.....	87
BAB IV PENUTUP	108
4.1 Kesimpulan.....	108
4.2 Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Terkait Peneletian Terdahulu dengan Penelitian yang dilakukan Penulis	10
Tabel 2. Analisis empat aspek pada Pasal 15 ayat (2) huruf d UU RI No. 40/1999 dan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016.....	56
Tabel 3. Analisis Konstruksi Norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU RI No. 40/1999 dan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 sebelum dilakukan Harmonisasi Hukum Horizontal	99
Tabel 4. Analisis Konstruksi Norma Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 setelah dilakukan Harmonisasi Hukum Horizontal	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah dari Masing-Masing Jenis Media yang Terdaftar Pada	
Situs Web Resmi Dewan Pers	51

DAFTAR SINGKATAN

- UUD NRI 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU RI No. 40/1999 : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- UU RI No. 11/2008 : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU RI No. 19/2016 : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU RI No. 12/2011 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- UU RI No. 11/1966 : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
- UU RI No. 4/1967 : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
- UU RI No. 21/1982 : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967
- UU ITE : Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

SKB UU ITE 2021	: Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KEJ	: Kode Etik Jurnalistik
HAM	: Hak Asasi Manusia
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
RUU	: Rancangan Undang-Undang
WNI	: Warga Negara Indonesia
WNA	: Warga Negara Asing
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
UU	: Undang-Undang
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah

Perpres	:	Peraturan Presiden
Perda	:	Peraturan Daerah
MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
MA	:	Mahkamah Agung
MK	:	Mahkamah Konstitusi
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
KY	:	Komisi Yudisial
BI	:	Bank Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT)

UPA Bahasa UPNVJT119

Lampiran 2. Validasi Transkrip 120

Lampiran 3. Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing 121

Lampiran 4. Surat Penugasan Pembimbing 122

Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi 123

**Lampiran 6. Formulir Persetujuan Judul yang ditandatangani Admin Prodi dan
Koordinator Program Studi..... 125**

Lampiran 7. Bukti Pembayaran UKT 126

Lampiran 8. Bukti KRS Terbaru 127

Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM..... 128

Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi 129

Lampiran 11. Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi 130

Lampiran 12. Keterangan Hasil Uji Turnitin Jurnal..... 132

Lampiran 13. Bukti LoA Jurnal 133

Lampiran 14. Lembar Revisi Skripsi 134